

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tiongkok saat ini muncul sebagai negara adidaya melawan Amerika Serikat setelah melewati masa-masa dari keterpurukan pada abad 20. Tiongkok mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka terbuka untuk kerja sama internasional maupun kerjasama multilateral. Selama pemerintahan Mao Zedong, Tiongkok menerapkan ekonomi proletar dengan kebijakan ekonomi yang berasaskan komunisme dan sosialisme. Prinsip dari kebijakan tersebut ialah hampir seluruh kepemilikan tanah dan fasilitas produksi adalah milik negara. Saat masa pemerintahan Mao Zedong telah berakhir dan digantikan Den Xiaoping, keterbukaan Tiongkok terhadap dunia internasional disertai dengan masuknya paham-paham demokrasi secara perlahan. Keterbukaan ini semakin berfokus pada tujuan kebijakan ekonomi politik internasional Tiongkok yang ekspansif dan hegemonic dengan mencanangkan *The Peaceful Rise of China* pada 22 Desember 2005. Tiongkok mulai memasuki era perdagangan multilateral setelah resmi memasuki WTO pada tahun 2005. Pada masa ini, Tiongkok telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi pasar meskipun pada prakteknya Tiongkok dirasa membangun keunggulan untuk menyaingi kekuatan ekonomi Amerika Serikat (Wishanti, 2016). Den Xiapong telah membawa ekonomi Tiongkok menjadi kekuatan baru di dunia internasional dengan kebijakan terkenalnya yaitu *Open Door Policy* dimana modernisasi Tiongkok berjalan di empat fokus utama yaitu bidang pertanian, industry dan teknologi, pendidikan, dan pertahanan.

Tiongkok mengalokasikan dana yang sangat besar dalam bidang pertahanan demi membangun armada militer yang kuat dari awalnya 14,6 miliar dolar Amerika terus mengalami peningkatan sampai 44,9 miliar dolar Amerika dalam kurun waktu 9 tahun. Tiongkok semakin

menunjukkan eksistensinya di perekonomian internasional dengan bergabung dalam berbagai organisasi internasional, seperti World Trade Organization (WTO), dan BRICS yang merupakan singkatan dari lima negara yang akan menjadi poros baru perputaran roda ekonomi yaitu Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan (Annisa Nadya, 2018). Sesungguhnya tindakan Tiongkok yang meningkatkan pertahanan negaranya tidak terlepas dari rivalitas dengan Amerika Serikat.

Amerika dan Tiongkok merupakan dua negara dengan pengaruh yang besar bagi perekonomian dunia, sehingga hubungan kedua negara ini kerap tidak harmonis. Kedua negara saling menunjukkan pengaruh mereka di isu-isu internasional. Ini tidak terlepas dari kemunculan Tiongkok sebagai negara yang digadang-gadang akan menjadi aktor superpower yang baru. Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi 1978, Tiongkok berkembang dengan pertumbuhan perekonomian tercepat di dunia. Bahkan pada tahun 2013, total GDP Tiongkok menjadi yang kedua terbesar setelah Amerika Serikat. Tentunya hal ini menjadi sebuah ancaman bagi Amerika Serikat sehingga menciptakan rivalitas diantara keduanya. Kedua negara ini satu sama lain berkompetisi di bidang ekonomi, politik, militer, dan lain-lain. Rivalitas ini pun termasuk pada perluasan pengaruh ke berbagai wilayah termasuk Asia Tenggara. Selain kawasan yang strategis bagi investasi, Asia Tenggara juga memiliki GNP mencapai US\$ 1,7 triliun dan menjadikannya sebagai pasar yang menjanjikan (Putera D. R., 2013).

Tiongkok kembali dihadapkan dengan masalah baru pada tahun 2019 dan tahun berikutnya menjadi tahun-tahun yang terburuk bagi seluruh negara di dunia karena munculnya virus bernama Covid-19 yang menjadi pandemi global. Awal mula Covid-19 ini terdeteksi di kota Wuhan pada 8 Desember 2019 dan diduga berasal dari pasar hewan liar yang ada di Wuhan. Awalnya penyakit ini tidak dihiraukan oleh Pemerintah Tiongkok sampai pada akhirnya komunitas medis di Wuhan sadar akan penyakit ini pada akhir Desember 2019. Pada awal tahun 2020, virus ini sudah menjadi

virus pandemi yang menyebar dengan cepat di berbagai belahan dunia. Di Tiongkok sendiri hampir separuh dari populasinya terdampak virus ini dan separuh dari yang terdampak meninggal dunia. Tiongkok saat itu mendapat berbagai tuntutan dan hujatan dari berbagai negara terutama Amerika Serikat yang tidak terkecuali terkena dampak dari virus tersebut. Pasalnya setelah Tiongkok, Amerika Serikat tercatat menjadi negara dengan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 terbanyak di seluruh dunia dan penelitian mengatakan virus ini telah masuk ke Amerika Serikat bahkan sebelum bulan Januari 2020 (Arnani, 2020). Penyebaran virus ini begitu cepat, termasuk kasus Covid-19 banyak di temui di Italia, Spanyol, Inggris, dan negara-negara kecil lainnya. Tiongkok mengambil tindakan dengan menlockdown secara ketat kota Wuhan tepatnya pada 23 Januari 2020 selama 76 hari bagi 11 juta warga disana. Tiongkok juga menerapkan protocol kesehatan berupa berdiam diri dirumah dan selalu memakai masker apabila pergi keluar serta menerapkan sistem social distancing sebanyak 1 meter. Tindakan lockdown tersebut diikuti oleh berbagai negara salah satunya melarang warga negara asing untuk berkunjung dan jadwal penerbangan di tiadakan guna untuk memperlambat penyebaran virus Covid-19. Negara-negara di dunia yang terkena dampak virus Covid-19 termasuk Amerika Serikat memerintahkan agar PBB mengambil tindakan tegas atas Tiongkok dikarenakan virus tersebut berawal dari negara mereka.

Wabah Covid-19 menjadi isu non-tradisional yang mengancam keamanan dunia termasuk wilayah regional negara-negara di Asia Tenggara. Pada awal munculnya Covid-19 selain Tiongkok dan wilayah Eropa, negara-negara di Asia Tenggara sempat menjadi penunjang kasus Covid terbanyak, salah satunya Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, dll. Respon pemerintahan dari setiap negara pun berbeda-beda, sejumlah pemerintah sangat proaktif dengan melakukan pengujian skala besar, melakukan pelacakan kontak, dan memberlakukan karantina masal dengan krisis ekonomi yang dialaminya. Disisi lainnya dan waktu yang sama terdapat

pemerintah yang acuh tak acuh dan meremehkan virus ini sehingga tidak melakukan lockdown akibatnya dari banyak warga negara asing dan wisatawan yang masuk menimbulkan lonjakan Covid-19. Dalam keadaan krisis ekonomi pada masa pandemi, kebijakan dalam negeri pun tidak dapat menekan laju virus maka dari itu, bantuan pihak asing berperan sangat dinamis. Salah satunya bantuan Tiongkok yang muncul sebagai kekuatan ekonomi paling berpengaruh pada masa pandemi ini.

ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura (Prihastomo, 2021) telah melakukan survei yang melibatkan 1.032 koresponden dari semua kalangan dari 10 negara anggota ASEAN. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 76,3% koresponden menganggap Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi paling berpengaruh di ASEAN dibandingkan negara-negara lainnya. Tiongkok memberikan bantuan berupa masker, bantuan APD, dan beberapa tenaga medis ke negara-negara anggota ASEAN dalam penanggulangan Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis merumuskan pertanyaan yang berfokus pada arah diplomasi Tiongkok dan Amerika Serikat. Maka rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu apakah tujuan utama diplomasi vaksin Tiongkok dan Amerika Serikat dalam membantu menangani Covid-19 di ASEAN?

1.3 Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan penjelasan dari data sekunder berupa Jurnal, Buku, Berita, dan Skripsi yang diuraikan secara konseptual. Dalam kerangka pemikiran akan berisikan deskripsi tentang Diplomasi dan Politik Luar Negeri Tiongkok dan Amerika Serikat dalam mengencarkan pengaruhnya pada situasi pandemic Covid-19 di ASEAN. Dengan adanya kerangka pemikiran ini akan membantu menjawab rumusan masalah yang ada.

a) Kebijakan Luar Negeri (Foreign Policy)

Kebijakan luar negeri suatu negara mencerminkan keadaan di dalam negara tersebut. Suatu negara akan menjalin hubungan kerja sama dengan negara lainnya dalam mencapai kepentingan nasionalnya, perilaku ini terjadi dalam sistem hubungan internasional. Suatu negara dalam sistem hubungan internasional akan mengeluarkan kebijakan luar negeri sesuai dengan kepentingannya. Kebijakan luar negeri suatu negara dapat mencerminkan situasi dan keadaan di dalam negara tersebut. Proses interaksi yang baik akan mencapai *win-win solution* dimana kedua negara mendapatkan keuntungan dari kerja sama tersebut.

Kebijakan luar negeri terdiri dari tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan yang akan mengeluarkan keputusan dan tindakan pemerintah tentang urusan yang bersifat eksternal, khususnya hubungan dengan negara-negara asing. Para pejabat pemerintah yang memiliki kedudukan penting seperti presiden, perdana menteri, menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri keuangan dan sebagainya bersama dengan para penasihat terdekatnya biasanya mereka adalah kunci dari pembuat kebijakan (Sorensen, 2016).

Sistem Hubungan Internasional dijalankan dengan 3 esensi didalamnya yang akan membentuk suatu interaksi dalam suatu kesatuan dan menjalankan suatu sistem hubungan internasional diantaranya yaitu, *actors*, *interest*, dan *power* (Putera, 2018). Proses interaksi dalam hubungan internasional diwujudkan dalam jalinan kerja sama antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai suatu keputusan.

Actors ialah pelaku-pelaku utama dalam hubungan internasional yang terbagi menjadi dua macam yaitu aktor negara (*state*) dan aktor non-negara (*non-state*). Secara tradisional, hubungan internasional berarti hubungan antar negara. Sehingga aktor utama dari interaksi hubungan internasional ialah negara (*state*). Seiring perkembangan dunia dan kondisi politik

mengindikasikan adanya perluasan aktor hubungan internasional dimana munculnya aktor-aktor bukan negara atau disebut aktor non-pemerintah. Aktor non-negara ini terdiri dari perusahaan-perusahaan multinasional (MNC), organisasi pemerintah internasional (IGO), organisasi nonpemerintah internasional (INGO), kejahatan transnasional terorganisasi (TOC), dan jaringan teroris internasional (Margono, 2015).

Konsep kepentingan nasional (*interest*) dan kebijakan luar negeri merupakan dua hal yang saling terkait. Hal ini karena kebijakan luar negeri merupakan alat atau instrument dari interaksi negara yang didorong oleh kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional menjadi tujuan dari suatu negara untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi, militer / keamanan, ideologi, dan politik. Suatu negara akan melakukan berbagai cara demi tercapainya kepentingan nasional negara tersebut. Dalam Hubungan Internasional, seringkali terjadi kesamaan maupun perbedaan national interest (kepentingan nasional) dalam tiap negara. Hal itu mengakibatkan munculnya berbagai aliansi- aliansi dan kubu-kubu politik untuk mewujudkan kepentingan nasional masing-masing.

Dalam melakukan kebijakan luar negeri, selain dibutuhkannya *Actors* dan adanya *Interest*, *Power* juga dibutuhkan sebagai elemen aktivitas kebijakan luar negeri. Power dibagi menjadi 2 yaitu *Soft Power* dan *Hard Power*. *Hard Power* ialah diplomasi yang dijalankan dalam bentuk perang seperti agresi militer dan politik. Sedangkan *soft power* ialah diplomasi dengan cara halus dimana tidak menggunakan unsur kekuatan militer melainkan melalui kapasitas suatu negara seperti budaya, ideologi, makanan, dan lain-lain. Seiring kemajuan teknologi dan perkembangan dalam dunia hubungan internasional, *Smart Power* muncul di era globalisasi dimana gabungan antara kedua power yaitu *hard* dan *soft power*. Praktik *smart power* sebelumnya sudah dilakukan oleh Presiden Amerika Barrack Obama. Peran *Smart Power* pada masa Obama ialah sebagai

pengganti dari *hard power* dan untuk menghapus citra buruk pada masa pemerintahan George W. Bush yang terkenal sebagai orang yang menerapkan kekuatan kohersif sekaligus mengerahkan seluruh instrumen militernya untuk melindungi keamanan negaranya.

Adapun tujuan dari politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara dimana pemerintah melalui para perumus kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. K.J Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu :

- Nilai (values) yang menjadi tujuan dari pembuat keputusan.
- Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.

b) Diplomasi

Diplomasi ialah seni dan praktek bernegosiasi yang dilakukan oleh seorang perwakilan negara dan organisasi atau sering disebut juga dengan diplomat. Melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas yang dilakukan melalui korespondens, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Dengan meningkatnya peran aktor non state dalam hubungan internasional, diplomasi mengalami perubahan dari yang semula bersifat *state centric* menjadi bervariasi derajatnya. Dari *state centric* hingga yang berorientasi antar warga negara (Ambarwati & Wijatmadja, 2016:139). Diplomasi yang paling sederhana dan banyak terjadi yaitu diplomasi bilateral antara kedua belah

pihak dan menjalankan misi dari kedutaan besar atau kunjungan kenegaraan. Selain itu terdapat diplomasi multilateral yang contohnya dilakukan oleh PBB sebagai institusi berlangsungnya diplomasi antara negara-negara tetangga atau dalam satu region (Setiawan A. , 2016)

Menurut Cambridge Dictionary, Diplomasi yang dibaca /dɪ'pləʊ.mə.si/ dalam Bahasa Inggris yang berarti "*The management of relationships between countries; skill in dealing with people without offending or upsetting them*". Diplomasi merupakan saluran penghubung dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam rangkaian hubungan antarnegara seperti perselisihan, konflik, isu internasional, dan pertikaian dengan cara negosiasi dan bargaining. Diplomasi bertujuan untuk mengejar kepentingan nasional dengan mempengaruhi sikap dan tingkah laku lawan atau negara lain tanpa membuat pihak lawan merasa tertekan dan marah. Seorang diplomat sekaligus merupakan representasi dari negaranya, sehingga tugas seorang diplomat tentulah sangat penting. Dalam prakteknya, diplomasi harus dibedakan dengan politik luar negeri karena diplomasi bukanlah merupakan sebuah kebijakan (Setiawan A. , 2016). Tetapi tetap saja keduanya tidak dapat dipisahkan dimana kegiatan diplomasi dapat merubah arah suatu kebijakan luar negeri dan sebaliknya diplomasi dipusatkan kepada metodologi untuk melaksanakan kebijakan luar negeri.

Salah satu perkembangan khusus metode diplomasi adalah meningkatnya jumlah aktivitas-aktivitas diplomasi seperti pertemuan, kunjungan, negosiasi dan penandatanganan traktat. Salah satu bentuk penting perjanjian internasional adalah meningkatnya pemakaian instrument-instrumen informal seperti Gentelement Agreement (GA) dan Memoranda of Understanding (MoU). Penerapan kesepakatan- kesepakatan tersebut merefleksikan peningkatan hubungan antara departemen- departemen dalam pemerintahan dengan aktor-aktor diplomasi pada level internasional. Saat menjalankan diplomasi dan bernegosiasi, tidak selamanya akan menghasilkan

keuntungan di kedua belah pihak. Menurut Lewichi terdapat tiga objektifitas negosiasi berdasarkan orientasinya. Pertama yaitu negosiasi integratif dimana negosiasi ini mengedepankan keuntungan di masing-masing pihak (*win-win solution*) guna mencapai kepentingan nasional negara dan menyatukan dengan kepentingan negara lain yang berbeda dalam memaksimalkan upaya bersama. Kedua, negosiasi distributif dimana hanya satu pihak saja yang mendapatkan keuntungan dengan persaingan yang sengit (*win-lose solution*) yang bersifat *zero sum game*. Dalam negosiasi distributif ini negara memanfaatkan keahlian tawar menawar mereka guna untuk meraih keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pihak lainnya. Ketiga, negosiasi destruktif (*lose-lose solution*) yaitu orientasi negosiasi yang tidak menguntungkan satu pihak maupun kedua pihak. Biasanya kedua pihak atau lebih tetap harus menanggung kerugian atau beberapa konsekuensi dari hubungan kerjasama tersebut (Alexandra, 2019).

1.4 Hipotesa

Sebagai negara rivalitas, Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan situasi pandemic Covid-19. Amerika Serikat memanfaatkan situasi pandemi untuk memperburuk citra Tiongkok karena menjadi tempat awal penyebaran virus. Sedangkan Tiongkok, melalui pandemic ingin memperbaiki citranya dengan memperlihatkan kekuatan dalam negerinya untuk mengatasi perkembangan virus dan membuat hubungan diplomasi baru melalui diplomasi vaksin.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan utama diplomasi vaksin Tiongkok dan Amerika Serikat di ASEAN pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana respon negara anggota ASEAN.

1.6 Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah penulisan penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup kajian guna memperjelas tema dan tujuan tulisan ini. Adapun fokus penelitian yaitu dalam rentang waktu tahun 2019-2021.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data library research dari data-data sekunder seperti buku, internet, jurnal, website. Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan data-data yang tersedia kemudian digunakan sebagai konsep yang menjelaskan pengaruh Tiongkok dan Amerika Serikat di ASEAN pada masa Covid-19 melalui Teori Kebijakan Luar Negeri dan Teori Diplomasi.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan skema penulisan 4 Bab dengan sistematika penulisan Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab 2 akan membahas awal kemunculan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan penyebarannya di kawasan ASEAN serta dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya pada Bab 3 berisikan diplomasi vaksin serta rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok serta respon yang diberikan oleh ASEAN dalam diplomasi vaksin tersebut. Bab 4 merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari tujuan diplomasi Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan ASEAN pada masa Covid-19.